



RENCANA KERJA TAHUN 2024



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

JL. KAPTEN A. RIVAI PALEMBANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita persembahkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan petunjuk-Nya Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini adalah media untuk mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil yang maksimal serta merupakan gambaran rencana kerja yang akan dicapai pada tahun anggaran 2024.

Mudah-mudahan penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 ini dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.3.1. Maksud	3
1.3.2. Tujuan.....	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	5
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	16
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	27
2.3.1. Identifikasi Masalah dan Hambatan ...	30
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	31
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	39
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...	48
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan	52
3.2.1. Tujuan	52
3.2.2. Sasaran.....	52

	3.2.3. Indikator Sasaran	52
	3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	53
BAB IV	PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai Pemerintah Daerah yang akan berakhir periode Perencanaan Jangka Menengah pada Tahun 2023, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 yang juga merupakan tindaklanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2023 dan daerah otonom baru. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Tahun 2024-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2024 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada Tahun 2024.

Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan visi dan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan satu kesatuan dari Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam sistem akuntabilitas, perencanaan strategi merupakan titik awal untuk melakukan pengukuran kinerja. Perencanaan strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Renstra PD kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program tahunan dalam Rencana Kerja PD (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

6. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah menyusun suatu rencana di bidang pelayanan administrasi serta menetapkan indikator kinerjanya, yang pelaksanaannya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada tahun bersangkutan.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah mengintegrasikan sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan agar penyelenggaraan pengawasan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
OPD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas
Pembangunan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023 dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPD s/d TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcomes)/ KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (Renstra SKPD) Tahun 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (Renja SKPD Tahun 2023)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD s/d TAHUN BERJALAN	
				TARGET RENJA SKPD TAHUN 2022	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TAHUN BERJALAN (Tahun 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7 = (6/5)	8	9 = (6+8)	10 = (9/4)
4	URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG								
4 01	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Administrasi Perkantoran yang Terlayani	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah peranko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran	1.510	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Jasa dan Surat Menyurat	Jumlah peranko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran	9.000	2550	2732	107	0	2732	30
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	0	0	0	4	4	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayar	4	4	4	100	0	4	100
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12	0	0	0	12	12	100

	- Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya	28	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan jasa jaminan milik daerah	Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya	-	0	0	0	0	0	0
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	3	74	74	100	3	77	2567
	- Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	58	65	83	128	58	141	243
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah tenaga administrasi keuangan	-	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	4	4	4	100	4	8	200
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	1	100	1	2	200
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	0	0	0	1	1	100
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	0	0	0	1	1	100
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	0	0	0	1	1	100

	- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	0	0	0	1	1	100
	- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah bangunan yang dijaga kebersihan	-	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	4	4	4	100	4	8	200
	- Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang tersedia	78	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	3	73	73	100	3	76	2533
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jenis barang cetak dan penggandaan yang tersedia	30	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	4	24	24	100	4	28	700
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis lampu dan komponen alat listrik	42	42	100	238	0	100	238
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	2	0	0	0	2	2	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU	3	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan	Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU	3	3	3	100	0	3	100
	- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14	0	0	0	14	14	100
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah rapat dan tamu yang terpenuhi makanan dan minumannya	1.356	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah paket bahan/material yang disediakan	95	50	50	100	45	95	100
	- Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	238	226	403	178	12	415	174

	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	136	124	187	151	12	199	146
	- Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	Jumlah tenaga ahli dan honorer	165	61	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	0	0	0	12	12	100
	- Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli	55	50	50	100	55	105	191
	- Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah tenaga ahli Fraksi	9	9	9	100	9	18	200
	- Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah tutor SKJ	22	2	0	0	2	2	9
	- Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	50	0	0	0	0	0	0
	- Dokumentasi Dan Publikasi	Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan	3	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Publikasi dan Dokumentasi	Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan	16	0	0	0	0	0	0
	- Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan	17	27	27	100	17	44	259
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, ke Luar Daerah dan Luar Negeri	Laporan hasil perjalanan dinas	3	0	0	0	0	0	0
	- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultansi ke Dalam Daerah, Luar Daerah	Laporan hasil perjalanan dinas	3	3	0	0	0	0	0
	- Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	3	3	3	100	3	6	200
	- Penyediaan Peralatan Dan Bahan Pembersih	Jumlah peralatan dan bahan pembersih	38	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Peralatan dan Bahan Kebersihan	Jumlah peralatan dan bahan pembersih	20	20	0	0	20	20	100

	- Pemeliharaan Kesehatan	Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup	75	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan	Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup	75	0	0	0	0	0	0
	- Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	75	75	20	27	75	95	127
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	-	0	100%	1	100
	- Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah Gedung yang Dibangun	1	1	0	0	0	0	0
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional	20	0	0	0	0	0	0
	- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	7	7	13	186	0	13	186
	- Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas	4	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	8	4	4	100	8	12	150
	- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	8	7	7	100	8	15	188
	- Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7	7	0	0	7	7	100
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas	5	5	0	0	0	0	0
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	18	0	0	0	0	0	0
	- Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	23	23	23	100	23	46	200
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah rumah jabatan/dinas	5	5	0	0	0	0	0
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8	7	7	100	0	7	88

	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	200	0	0	0	200	200	100
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	4	4	0	0	0	0	0
	- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah rumah jaga dan ruang kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang direhabilitasi	8	3	0	0	0	0	0
	- Perlengkapan Kearsipan dan Perpustakaan	Jumlah pemeliharaan kearsipan dan perpustakaan	2	2	0	0	2	2	100
	- Penyediaan Kebutuhan Kerumahaan Pimpinan Dewan	Jumlah Pimpinan DPRD yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya	4	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	384	4	4	100	384	388	101
1 20 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	-	0	100%	1	100
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	450	0	0	0	0	0	0
	- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	0	0	0	0	0	0
	- Pengadaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan pakaian Dinas	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	1.130	0	0	0	0	0	0
	- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	6	400	375	94	6	381	6350
	- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6	0	0	0	0	0	0
	- Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	6	0	0	0	0	0	0
1 20 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	-	0	100%	1	100

	- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	10	0	0	0	0	0	0
	- Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	40	0	0	0	0	0	0
	- Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	24	0	0	0	0	0	0
	- Pendidikan dan Pelatihan Teknis	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	50	0	0	0	0	0	0
	- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	160	105	141	134	55	196	123
	- Benchmarking Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3	0	0	0	0	0	0
	- Capacity Building SDM Aparatur Bidang Perencanaan (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building	3	0	0	0	0	0	0
	- Benchmarking Peningkatan SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3	0	0	0	0	0	0
	Bimbingan Teknis SAKIP Perangkat Daerah (DID)	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	3	0	0	0	0	0	0
1 20 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	Persentase Sistem Capaian Kinerja yang Meningkat/Berkembang	100%	-	-	0	-	0	0
	- Penyusunan Renstra	Jumlah Dokumen Renstra	1	0	0	0	0	0	0
	- Pendataan dan Penataan Arsip Aktif dan non Aktif	Jumlah arsip aktif dan non aktif	1	0	0	0	0	0	0
	- Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	2	1	1	100	1	2	100
	- Penyelesaian Kewajiban Pemerintah Prov. Sumsel	Terbayarnya utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	-	0	0	0	0	0	0
	- Penyusunan LAKIP Perangkat Daerah (DID Kinerja SAKIP)	Jumlah Dokumen LAKIP	1	0	0	0	0	0	0

	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	1	1	100	1	2	200
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	0	0	0	1	1	100
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	1	1	100	2	3	150
	- Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD		0	0	0	0	0	0
1 20 15	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase anggota Dewan yang meningkat kapasitasnya	89%	88%	0%	0	89%	89%	100
	- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah buletin Perda 2014-2019	11	0	0	0	0	0	0
	- Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	12	10	10	100	12	22	183
	- Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Perda	6	6	6	100	6	12	200
	- Rapat-Rapat Paripurna	Jumlah Risalah Rapat Paripurna	102	0	0	0	0	0	0
	- Penyelenggaraan kajian perundang-undangan	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan	3	1	0	0	2	2	67
	- Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	2	1	1	100	1	2	100
	- Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	2	2	100	2	4	100

	- Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	2	2	100	2	4	100
	- Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	4	4	100	2	6	100
	- Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	6	4	4	100	2	6	100
	- Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6	4	4	100	2	6	100
	- Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	2	1	1	100	1	2	100
	- Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	8	4	4	100	4	8	100
	- Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	-	0	0	0	0	0	0
	- Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	2	1	0	0	1	1	50
	- Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	6	0	0	0	6	6	100
	- Kegiatan Reses	Jumlah laporan kegiatan reses	7	0	0	0	0	0	0
	- Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	1	1	100	1	2	100
	- Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3	3	3	100	3	6	100
	- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	Jumlah laporan bimtek, outbond dan orientasi pendalaman materi	11	3	0	0	0	0	0
	- Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3	1	1	100	2	3	100

	- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kab/kota yang disosialisasikan Peraturan Per UU	17	17	0	0	17	17	100
	- Dialog/Audensi DPRD dg Tokoh-tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Masyarakat	Jumlah laporan dialog	48	12	0	0	0	0	0
	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	2	1	1	100	1	2	100
	- Pengembangan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik DPRD	Jumlah jenis media informasi yang dikembangkan	2	2	0	0	0	0	0
	- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	1	4	4	100	1	5	500
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	100	107	107	100	207	207
	- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75	75	75	100	75	150	200

Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah Pelaksanaan Medical Check Up DPRD karena padatnya kegiatan Pimpinan dan anggota.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Secara umum Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan pengawasan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2019-2023 serta Rencana Kerja Tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang ditetapkan, digambarkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan analisa dari kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis.

Penetapan indikator kinerja kegiatan didasarkan pada kelompok masukan (inputs), keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan dalam satuan unit, paket, kelompok, persen, orang, rupiah, buah, hari dan sebagainya. Berikut tabel pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan :

TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD					REALISASI CAPAIAN				PROYEKSI TAHUN 2023	CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Jumlah perangko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran		Jumlah perangko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran	1.510	-	-	-	-	1.497	-			-	
2	Jumlah perangko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran		Jumlah perangko dan materai yang mendukung administrasi perkantoran	-	3.225	3.225	2.550	-		3225	2061	2732	0	
3	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					4					4	
4	Jumlah rekening yang terbayar		Jumlah rekening yang terbayar	4	4	4	4	-	4	4	4	4	0	
5	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan					12					12	
6	Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya		Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya	28	-	-	-	-	28	0	57		0	

7	Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya		Jumlah rumah dinas dan mess yang dibayarkan PBB serta jumlah kendaraan yang terbayar asuransinya	-	35	57				35				-
8	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD		Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD				74	3				74		3
9	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan terbayar pajaknya	86	86	86	65	58	45	86	57	83		58
10	Jumlah tenaga administrasi keuangan		Jumlah tenaga administrasi keuangan	3	3	3			3	3	7			0
11	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				4	4				4		4
12	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1	1				1		1
13	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD		Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD					1						1
14	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD					1						1
15	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD		Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD					1						1

16	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD		Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD					1					1	
17	Jumlah bangunan yang dijaga kebersihan		Jumlah bangunan yang dijaga kebersihan	12	12	12			12	12	12		0	
18	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan				4	4				4	4	
19	Jenis ATK yang tersedia		Jenis ATK yang tersedia	74	73	78			55	73	73		0	
20	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				73	3				73	3	
21	Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia		Jenis barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	28	24	30			24	24	24		0	
22	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				24	4				24	4	
23	Jenis lampu dan komponen alat listrik		Jenis lampu dan komponen alat listrik	35	40	40	42		35	40	40	100	0	
24	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					2					2	
25	Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU		Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU	3	0	0		0	3	0			0	
26	Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU		Jenis bahan bacaan dan peraturan per UU	0	3	3	3			3	3	3	0	
27	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan		Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan					14					14	

28	Jumlah rapat dan tamu yang terpenuhi makanan dan minumannya		Jumlah rapat dan tamu yang terpenuhi makanan dan minumannya	812	294	250		0	372	294	295		0
29	Jumlah paket bahan/material yang disediakan		Jumlah paket bahan/material yang disediakan				50	45				50	45
30	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu		Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu				226	12				403	12
31	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				124	12				187	12
32	Jumlah tenaga ahli dan honorer		Jumlah tenaga ahli dan honorer	156	165	61	61		154	165	210		0
33	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan					12					12
34	Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli		Jumlah orang dalam kelompok pakar dan tim ahli				50	55				50	55
35	Jumlah tenaga ahli Fraksi		Jumlah tenaga ahli Fraksi				9	9				9	9
36	Jumlah tutor SKJ		Jumlah tutor SKJ	22	2	2	2	2	22	2	2		2
37	Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar		Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar	50					50	0	0		0
38	Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan		Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan	3	0	0	0	0	3	0			0
39	Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan		Jenis media massa tentang kegiatan anggota Dewan	0	16	3				16	20		0
40	Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan		Jumlah dokumen penyebarluasan produk hukum daerah, publikasi dan dokumentasi Dewan				27	17				27	17

41	Laporan hasil perjalanan dinas		Laporan hasil perjalanan dinas	3	0	0	0	0	2	0			0
42	Laporan hasil perjalanan dinas		Laporan hasil perjalanan dinas	0	3	3	3			3	2		0
43	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD		Jumlah dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD				3	3				3	3
44	Jumlah peralatan dan bahan pembersih		Jumlah peralatan dan bahan pembersih	38	0	0	0	0	38	0			0
45	Jumlah peralatan dan bahan pembersih		Jumlah peralatan dan bahan pembersih	0	20	20	20	20		20	20		20
46	Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup		Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup	75	0	0	0	0	8	0			0
47	Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup		Jumlah anggota dewan yang melakukan medical checkup	0	75	75				75	4		0
48	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD		Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD				75	75				20	75
49	Jumlah Gedung yang Dibangun		Jumlah Gedung yang Dibangun	0	0	0	1	0	0	0	8		0
50	Jumlah kendaraan dinas/operasional		Jumlah kendaraan dinas/operasional	16	0	4		0	15	0	5		0
51	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7					13	0
52	Jumlah rumah jabatan/dinas		Jumlah rumah jabatan/dinas	4	4	4		0	4	4	4		0
53	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan		Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan				4	8				4	8
54	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	7	0	0	0	0	6	0			0

55	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				7	8				7	8	
56	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	0	7	7	7	7		7	11		7	
57	Jumlah rumah jabatan/dinas		Jumlah rumah jabatan/dinas	5	1	5	5		5	1	4		0	
58	Jumlah gedung yang dipelihara		Jumlah gedung yang dipelihara	7	18	7			7	18	7		0	
59	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				23	23				23	23	
60	Jumlah rumah jabatan/dinas		Jumlah rumah jabatan/dinas	5	2	5	5		4	2	2		0	
61	Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2	8	7	7		2	8	8	7	0	
62	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi					200					200	
63	Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi		Jumlah rumah dinas yang direhabilitasi	1	3	4	4		1	3	4		0	
64	Jumlah rumah jaga dan ruang kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang direhabilitasi		Jumlah rumah jaga dan ruang kerja Pimpinan dan Anggota DPRD yang direhabilitasi	4	8	3	3		4	8	7		0	
65	Jumlah pemeliharaan kearsipan dan perpustakaan		Jumlah pemeliharaan kearsipan dan perpustakaan	0	2	2	2	2		2	2		2	
66	Jumlah Pimpinan DPRD yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya		Jumlah Pimpinan DPRD yang terpenuhi kebutuhan rumah tangganya	4	4	4			3	4	4		0	
67	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan		Jumlah paket kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan				4	384				4	384	

68	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	450	0	0	0	0	450	0			0
69	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan					0					0
70	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia		Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang tersedia	0	565	565			565	578			0
71	Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan		Jumlah paket pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan				400	6				375	6
72	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0	4	6	0	0	4	6			0
73	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0	20	20	0	0	20	23			0
74	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	24	0	0	0	0	35	0			0
75	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan		Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan	0	30	20			30	34			0
76	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan		Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan				105	55				141	55
77	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking		Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3	0	0	0	0	3	0			0
78	Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building		Jumlah Aparatur yang mengikuti Capacity Building	3	0	0	0	0	2	0			0
79	Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking		Jumlah Aparatur yang mengikuti Benchmarking	3	0	0	0	0	3	0			0
80	Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Teknis SAKIP	3	0	0	0	0	3	0			0
81	Jumlah Dokumen Renstra		Jumlah Dokumen Renstra	1	0	0	0	0	1	0			0

82	Jumlah arsip aktif dan non aktif		Jumlah arsip aktif dan non aktif	1	0	0	0	0	1	0			0	
83	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD		Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD				1	1				1	1	
84	Terbayarnya utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan		Terbayarnya utang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	0	0	0	0	0		0			0	
85	Jumlah Dokumen LAKIP		Jumlah Dokumen LAKIP	0	1	0	0	0		1	1		0	
86	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD				1	1				1	1	
87	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					1					1	
88	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD				1	2				1	2	
89	Jumlah buletin Perda 2014-2019		Jumlah buletin Perda 2014-2019	1	6	4			1	6	1		0	
90	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah		Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah				10	12				10	12	
91	Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Perda		Jumlah dokumen hasil pembahasan Rancangan Perda				6	6				6	6	
92	Jumlah Risalah Rapat Paripurna		Jumlah Risalah Rapat Paripurna	35	35	32			37	35	41		0	

93	Jumlah dokumen kajian perundang-undangan		Jumlah dokumen kajian perundang-undangan				1	2				0	2	
94	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1	1				1	1	
95	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2	2				2	2	
96	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2	2				2	2	
97	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				4	2				4	2	
98	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD				4	2				4	2	
99	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				4	2				4	2	
100	Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan		Jumlah dokumen hasil pengawasan tindak lanjut hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1	1				1	1	
101	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				4	4				4	4	
102	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1	1				0	1	

103	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD					6					6	
104	Jumlah laporan kegiatan reses		Jumlah laporan kegiatan reses	2	2	3			2	2	3		0	
105	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				1	1				1	1	
106	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3	3				3	3	
107	Jumlah laporan bimtek, outbond dan orientasi pendalaman materi		Jumlah laporan bimtek, outbond dan orientasi pendalaman materi	2	3	3	3		2	3	1		0	
108	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				1	2				1	2	
109	Jumlah kab/kota yang disosialisasikan Peraturan Per UU		Jumlah kab/kota yang disosialisasikan Peraturan Per UU	0	17	17	17	17	0	17	0		17	
110	Jumlah laporan dialog		Jumlah laporan dialog	12	12	12	12		12	12	12		0	
111	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1	1				1	1	
112	Jumlah jenis media informasi yang dikembangkan		Jumlah jenis media informasi yang dikembangkan	2	2	2	2		2	2	2		0	
113	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD				4	1				4	1	
114	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				100	100				107	100	
115	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				75	75				75	75	

Dari tabel tersebut pencapaian kinerja pada tahun 2022 secara umum mencapai target Renstra 2019-2022. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tugas pokok dan fungsi anggota yang semakin meningkat.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 50 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan antara lain:

1. Tugas Pokok Sekretaris DPRD

Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

2. Fungsi Sekretariat DPRD

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Perkembangan teknologi informasi dan munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

Setiap organisasi menghadapi masalah lingkungan strategis yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal mencakup faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang umumnya dapat dikendalikan secara langsung. DPRD mempunyai fungsi legislasi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur, fungsi anggaran yang diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah dan fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Untuk mewujudkan fungsinya tersebut diperlukan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan organisasi/kelembagaan.

Lingkungan eksternal merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi yang berada di luar

kendali organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi tersebut. Lingkungan ini terdiri dari peluang dan tantangan.

Peluang terdiri dari :

1. Tingginya standar pelayanan dan dukungan yang dibutuhkan anggota DPRD;
2. Tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyaluran aspirasi secara demokratis;
3. Semakin besarnya volume kegiatan DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah;
4. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang harus diikuti sehingga terbukanya peluang pengembangan Aplikasi Teknologi Informasi untuk peningkatan aksesibilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
5. Tersedianya Peraturan Pemerintah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Agenda reformasi yang terus bergulir telah mendorong daya kritis dan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, tanpa terkecuali lembaga perwakilan rakyat daerah. Sorotan terhadap lembaga DPRD ini makin menguat dengan terkuaknya banyak kasus yang dialami oleh para anggota DPRD.

Munculnya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan keterbukaan informasi bagi publik, kewajiban untuk membangun akuntabilitas organisasi, standar pelayanan yang harus dicapai, seperti kewajiban untuk melibatkan para stakeholder dalam proses pembuatan keputusan publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Aparatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada para anggota

DPRD ini. Oleh karena itu, Sekretariat DPRD atau yang dikenal dengan istilah Setwan ini harus terpacu untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan tidak saja kepada institusi yang dilayani yaitu DPRD namun juga kepada seluruh stakeholder terkait, khususnya masyarakat.

2.3.1. Identifikasi Masalah dan Hambatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi kelembagaan, tidak lepas dari dinamika organisasi yang mungkin memunculkan berbagai permasalahan, meski secara umum permasalahan tersebut masih dapat diatasi. Adapun akar permasalahan yang dirasakan cukup dominan yang mengganggu terhadap belum optimalnya Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, adalah :

1. Aspek sumber daya manusia

Permasalahan pada sumber daya aparatur Sekretariat Dewan dialami oleh seluruh Bagian yang terdapat dalam struktur organisasi Sekretariat Dewan, sehingga dapat mempengaruhi kinerja Sekretariat Dewan secara keseluruhan. Secara umum permasalahan yang ada dalam setiap bagian Sekretariat Dewan adalah:

- a. Kuantitas dan Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dibebankan;
- b. Kesertaan sumber daya manusia dalam pelatihan dan pendidikan sangatlah kurang sehingga kualitas yang ada saat ini belum mampu ditingkatkan sementara kebutuhan kualitas terus meningkat;
- c. Belum adanya sistem informasi kepegawaian yang terpadu dalam organisasi Sekretariat Dewan.

2. Perubahan Struktur Organisasi

Permasalahan dalam struktur organisasi merupakan permasalahan yang bersifat menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh karena Sekretariat DPRD diatur dan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan terjadinya perubahan struktur tersebut, setiap aparatur harus mengetahui, memahami dan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dan bimbingan teknis mengenai tugas dan fungsi yang baru.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat rancangan awal RKPD tahun 2024. Ada 2 (dua) program, 17 (tujuh belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang bisa dilihat di tabel berikut ini:

TABEL 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEGIATAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu	13		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu	13		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2		
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1		
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1		
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1		
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1		

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7		
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu	100%		
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100/14		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100/14		
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12		
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2		
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2		
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1		
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP	100%		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP	100%		
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1		

14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1		
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1		Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1		
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	104		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	104		
V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3		
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7		
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24		
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	123		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	123		
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6		
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14		
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	400		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	400		
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4		

25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3		
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0		
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5		
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%		
27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4		
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17 kab/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17 kab/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%		
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56		
31	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23		

32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100		
IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	0	Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%		
33	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Palembang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Palembang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75		
34	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4		
35	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75		
X	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%		Layanan Administrasi DPRD		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%		
36	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1		
37	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30		
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Palembang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	384		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Palembang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	384		
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	0	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	1		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	0	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	1		
XI	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP	100%		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP	100%		
39	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10		

40	Pembahasan Rancangan Perda	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20		Pembahasan Rancangan Perda	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20		
41	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1		
XII	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP	100%		Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP	100%		
42	Pembahasan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4		Pembahasan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4		
43	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4		
44	Pembahasan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4		Pembahasan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4		
45	Pembahasan Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	4		Pembahasan Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	4		
46	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4		Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4		
XIII	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu	100%		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu	100%		
47	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Palembang	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4		Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Palembang	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4		
XIV	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas	100%		Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas	100%		
48	Orientasi DPRD	Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1		Orientasi DPRD	Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1		
49	Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1		Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1		

50	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	50		Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	50		
51	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palembang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palembang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55		
52	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Palembang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Palembang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9		
53	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6		
XV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP	100%		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP	100%		
54	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2		Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2		
55	Pelaksanaan Reses	17 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2		Pelaksanaan Reses	17 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2		
XVI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP	100%		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP	100%		
56	Penyusunan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1		Penyusunan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1		
57	Pengawasan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1		Pengawasan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1		
XVII	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP	100%		Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP	100%		
58	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3		Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3		
JUMLAH											

Dari analisis kebutuhan terhadap rancangan awal RKPD, semua program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun anggaran 2024 dapat dilaksanakan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga pendukung yang keberadaannya terkait dengan keberadaan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai sasaran utama adalah terwujudnya perencanaan, pelaksanaan dan pelayanan prima kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi anggota dewan.

Dari uraian tersebut dapat dijelaskan jenis pelayanan yang diberikan kepada anggota dewan dalam hal memfasilitasi kegiatan rapat dan persidangan DPRD, kegiatan alat kelengkapan DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan/pengendalian terhadap jalannya kebijakan yang telah ditetapkan DPRD dalam pembahasan produk hukum termasuk peraturan daerah, memfasilitasi DPRD dalam penerimaan aspirasi masyarakat, dan mensosialisasikan kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, melayani kegiatan Keprotokolan Pimpinan dan Anggota DPRD. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan, memfasilitasi DPRD dalam pembahasan berkaitan dengan APBD (Murni, Perubahan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD).

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah membuat 2 (dua) program 17 (tujuh belas) kegiatan dan 58 (lima puluh delapan) sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Diharapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2024 dapat memenuhi tantangan dan

mengatasi hambatan yang dihadapi agar kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan menjadi lebih optimal. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2024 dapat dilihat di tabel berikut ini :

TABEL 2.5
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2024
PROVINSI SUMATERA SELATAN

SKPD : SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
A	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu	13	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	1	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Palembang	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	1	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	

7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu	100%	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100/14	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	2	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
11	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	
12	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	
IV	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP	100%	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	
14	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	
15	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	
16	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	104	

V	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	3	
18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	7	
19	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	24	
20	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	123	
21	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	6	
22	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	14	
23	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Palembang	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	400	
24	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4	
25	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	3	
VI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
26	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	
VII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%	

27	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17 kab/kota	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	
29	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	
VIII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik	100%	
30	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	56	
31	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	23	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	100	
IX	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu	100%	
33	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Palembang	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	75	
34	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Palembang	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	4	
35	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Palembang	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75	
X	Layanan Administrasi DPRD		Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap	100%	
36	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1	

37	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	30	
38	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Palembang	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	384	
B	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	0	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani	1	
XI	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP	100%	
39	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10	
40	Pembahasan Rancangan Perda	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	20	
41	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	
XII	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP	100%	
42	Pembahasan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	4	
43	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	4	
44	Pembahasan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	4	
45	Pembahasan Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	4	
46	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	4	
XIII	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Persentase Risalah Rapat yang Tepat Waktu	100%	

47	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Palembang	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	4	
XIV	Peningkatan Kapasitas DPRD		Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas	100%	
48	Orientasi DPRD	Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	
49	Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	1	
50	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	50	
51	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palembang	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	55	
52	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Palembang	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	9	
53	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Palembang	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	6	
XV	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP	100%	
54	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Palembang	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2	
55	Pelaksanaan Reses	17 kab/kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	2	
XVI	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP	100%	
56	Penyusunan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	
57	Pengawasan Kode Etik DPRD	Palembang	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1	

XVII	Fasilitasi Tugas DPRD		Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP	100%	
58	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Sumatera Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, merupakan implementasi dari tahun pertama dari RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD untuk periode ini sangat penting karena merupakan langkah awal dalam pencapaian target-target yang ditetapkan dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

Sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tujuan dan sasaran pembangunan merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana yang terdapat dalam RPJMD, dalam hal ini RPD. Untuk itu, dalam penetapan sasaran pembangunan tahun 2024, RKPD Provinsi Sumatera Selatan mengacu tujuan dan sasaran dalam RPD Sumatera Selatan. Adapun Tujuan dan Sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,74
		Pendapatan per Kapita/PDRB ADHB	Rp.Juta/Kapita	71,67
		Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Indeks	6
		Indeks Entropi Theil	Indeks	2,097
	Meningkatnya perekonomian sektor unggulan	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan (Pertanian, Pertambangan, Industri Pengolahan)	%	5,48
		Nilai Tukar Petani	Nilai	109,11
	Meningkatnya ekosistem inovasi	Indeks Ekosistem Inovasi	Indeks	2,72

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
	Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Harga Berlaku	%	2,5
	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM	Pertumbuhan PDRB sub sektor perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor serta penyediaan makan dan minum	%	12,7
	Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah	Neraca perdagangan	US\$ Juta	4294,81
		Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Sumsel untuk harga berlaku	%	15,64
	Terkendalinya laju inflasi daerah	Tingkat Inflasi Daerah	%	2,5±1
	Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi	%	4,76
	Meningkatnya perekonomian desa	Persentase peningkatan desa maju dan mandiri	%	5,79
Meningkatnya kemandirian transmigran	Persentase satuan permukiman transmigrasi yang mandiri	%	70	
Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	%	10,95	
	Gini Ratio	Ratio	0,324	
	Menurunnya tingkat pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,14
	Meningkatnya pendapatan rumah tangga	Pengeluaran per kapita	Rp.000/kapita/bln	11244
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	74,42
	Pengurangan beban rumah tangga miskin	Persentase rumah tangga miskin yang mendapat perlindungan sosial	%	80
Persentase kasus gizi buruk pada rumah tangga miskin		%	5	
Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,63	
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	93,94	
	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	70	
	Prevalensi Stunting	%	14,3	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	70,66
	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,65
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	8,57

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target
Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93
		Persentase Penurunan Emisi GRK	%	8,04
		Indeks Risiko Bencana Sumsel	Indeks	136,53
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	87,8
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	60,11
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKL)	Indeks	43,55
		Indeks Kualitas Air Laut dan Pesisir (IKAL)	Indeks	82
	Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah	Persentase penurunan tingkat kerentanan bencana	%	5,00
		Persentase peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	%	10,00
Peningkatan tata kelola pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	67,5 (B)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	80,55
		Opini BPK	Opini	WTP
		Indeks Integritas Daerah	Indeks	73,26
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	A
	Meningkatnya kapabilitas birokrasi	Indeks SPBE	Indeks	2,85

Dalam mencapai target pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024, perlu dilakukan perumusan prioritas pembangunan daerah yang bertujuan untuk memfokuskan rencana pembangunan di Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan dengan melakukan telaah RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026, telaah RKP Tahun 2024, telaah RTRW Provinsi Sumatera Selatan, telaah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) dan Analisis Isu Strategis Daerah.

Dengan mempertimbangkan arahan RPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026, RKP tahun 2024, RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036, Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) dan Isu Strategis, maka ditetapkanlah tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 yaitu “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan” dengan beberapa Prioritas Daerah RKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, yaitu :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Pembangunan tahun 2024 menjadi starting point bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tahap I RPD. Pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi maka pada tahun 2024 ini tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”. Pada tahun ini pembangunan ekonomi masyarakat yang akan terus dibangun hingga merata ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga dilakukan agar SDM terutama peningkatan kualitas skill tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan mampu bekerja disektor yang berpotensi dengan pendapatan tinggi. Dengan ini diharapkan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, yang didukung dengan pelayanan publik yang handal bagian dari reformasi birokrasi.

Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai program dan kegiatan yang disesuaikan dengan arah kebijakan tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

3.2.1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai adalah Pelayanan prima dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

3.2.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai secara nyata oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengelolaan administrasi. Sasaran dalam pelayanan terhadap Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kebutuhan administrasi DPRD;
2. Terpenuhinya kebutuhan penunjang kerja DPRD;
3. Ketepatan waktu Memfasilitasi kegiatan DPRD.

3.2.3. Indikator Sasaran

Indikator sasaran sebagai berikut :

1. Persentase administrasi yang tepat waktu;
2. Persentase pertanggungjawaban keuangan sesuai standar akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Persentase kebutuhan penunjang kerja DPRD yang sesuai standar;
4. Persentase agenda DPRD yang difasilitasi sesuai jadwal.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan penjabaran dari sasaran yang akan dicapai. Kegiatan adalah tindakan nyata yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD dalam merealisasikan suatu program, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tabel rencana program dan kegiatan tahun 2024 dan prakiraan maju rencana tahun 2025 digambarkan dalam tabel berikut ini :

Tabel

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Nomor	Kode	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%				100%			
<i>1</i>	<i>4.02.01.1.01</i>	<i>Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Laporan Kinerja OPD yang tepat waktu</i>		<i>13</i>				<i>13</i>			
1	4.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	2		PAD		2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	
2	4.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
3	4.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA- SKPD	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
4	4.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
5	4.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA- SKPD	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja

6	4.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Sumatera Selatan	7		PAD		7		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
7	4.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumatera Selatan	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
II	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pertanggung jawaban Keuangan yang tepat waktu		100%				100%			
8	4.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	100/14		DAU		100/14		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
9	4.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	12		PAD		12		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
10	4.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Palembang	2		PAD		2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
III	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik		100%				100%			
11	4.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumatera Selatan	2		PAD		2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
12	4.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
IV	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Pekerjaan yang sesuai SOP		100%				100%			

13	4.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
14	4.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
15	4.02.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Palembang	1		PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
16	4.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Dalam dan Luar Daerah	104		PAD		104		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
V	4.02.01.1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%				100%			
17	4.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Palembang	3		PAD		3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
18	4.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Palembang	7		PAD		10		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
19	4.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Palembang	24		PAD		24		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
20	4.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Palembang	123		PAD		123		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
21	4.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Palembang	6		PAD		6		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

22	4.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Palembang	14		PAD		14		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
23	4.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Palembang	400		PAD		400		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
24	4.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Palembang	4		PAD		4		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
25	4.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Palembang	3		PAD		3		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VI	4.02.01.1.07	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%				100%			
	4.02.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Palembang			PAD		4		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
26	4.02.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Palembang	5		PAD		2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
	4.02.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Palembang			PAD		1		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VII	4.02.01.1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap</i>		100%				100%			
27	4.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	4		PAD		4		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

28	4.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17 kab/kota	12		PAD		12		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
29	4.02.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Palembang	12		PAD		12		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
VIII	4.02.01.1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Peralatan dan Perlengkapan di Kantor dan Rumah Dinas yang Baik</i>		100%				100%			
30	4.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnannya	Palembang	56		PAD		56		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
31	4.02.01.1.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	23		PAD		23		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
32	4.02.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Palembang	100		PAD		100		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
IX	4.02.01.1.15	<i>Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>	<i>Persentase Pertanggungjawaban Keuangan yang Tepat Waktu</i>		100%				100%			
33	4.02.01.1.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Palembang	75		DAU		75		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
34	4.02.01.1.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Palembang	4		PAD		2		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
35	4.02.01.1.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Palembang	75		PAD		75		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik

X	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD	Persentase Dokumen Administrasi Anggota DPRD yang Lengkap		100%				100%			
36	4.02.01.1.16.03	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Palembang	1		PAD				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
37	4.02.01.1.16.04	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Palembang	30		PAD		30		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
38	4.02.02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Palembang	384		PAD		384		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Transformasi Pelayanan Publik
B	4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase Administrasi DPRD yang terlayani		100%				100%			
XI	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembentukan Perda dan Peraturan yang Sesuai SOP		100%				100%			
39	4.02.02.1.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	10		PAD		10		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
40	4.02.02.1.01.02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Palembang	20		PAD		20		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
41	4.02.02.1.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XII	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pembahasan Kebijakan Anggaran yang Sesuai SOP		100%				100%			
42	4.02.02.1.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Palembang	4		PAD		4		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik

43	4.02.02.1.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	4		PAD		4		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
44	4.02.02.1.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Palembang	4		PAD		4		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
45	4.02.02.1.02.04	Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Palembang	4		PAD		4		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
46	4.02.02.1.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Palembang	4		PAD		4		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XIII	4.02.02.1.03	<i>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan</i>	<i>Persentase Riset yang Tepat Waktu</i>		100%				100%			
	4.02.02.1.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
	4.02.02.1.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
	4.02.02.1.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
	4.02.02.1.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
	4.02.02.1.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
	4.02.02.1.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik

47	4.02.02.1.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Palembang	4		PAD		4		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XIV	4.02.02.1.04	<i>Peningkatan Kapasitas DPRD</i>	<i>Persentase Tenaga Ahli yang Sesuai Bidang Tugas</i>		100%				100%			
48	4.02.02.1.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Luar Daerah	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
49	4.02.02.1.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dalam dan Luar Daerah	1		PAD		2		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
50	4.02.02.1.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Sumatera Selatan	50		PAD		50		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
51	4.02.02.1.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Palembang	55		PAD		55		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
52	4.02.02.1.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Palembang	9		PAD		9		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
53	4.02.02.1.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Palembang	6		PAD		6		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XV	4.02.02.1.05	<i>Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pekerjaan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang Sesuai SOP</i>		100%				100%			
	4.02.02.1.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	17 kab/kota	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
54	4.02.02.1.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Palembang	2		PAD		2		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
55	4.02.02.1.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	17 kab/kota	2		PAD		3		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik

XVI	4.02.02.1.06	<i>Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan Kode Etik yang Sesuai SOP</i>		100%				100%			
56	4.02.02.1.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
57	4.02.02.1.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Palembang	1		PAD		1		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
XVII	4.02.02.1.08	<i>Fasilitasi Tugas DPRD</i>	<i>Persentase Penyelesaian Pekerjaan Fasilitasi Tugas DPRD yang Sesuai SOP</i>		100%				100%			
58	4.02.02.1.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri	3		PAD		3		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Transformasi Pelayanan Publik
Jumlah												

BAB IV

PENUTUP

Demikianlah, kami sampaikan Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya Rencana Kerja Tahun 2024 ini akan menjadi acuan dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan serta akan dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendatang.

Selain itu Rencana Kerja Tahun 2024 merupakan dasar untuk program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 dan diharapkan dapat mendukung peran, tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya.

Atas telah tersusunnya Rencana Kerja Tahun 2024 Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kami ucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan Renja ini.